

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Untuk menganalisis penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba pada Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 2) Untuk menganalisis kebijakan hukum ke depan terhadap Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Berangkat dari tujuan tersebut maka dirumuskan 2 (dua) permasalahan yaitu: 1) Bagaimana penegakan hukum tindak pidana terhadap penyalahgunaan narkoba pada Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika? 2) Bagaimana kebijakan hukum ke depan terhadap Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini: 1) Penegakan hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Terdapat konflik hukum di dalam Undang-Undang ini yaitu antara beberapa Pasal yaitu Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Yang mana di dalam Pasal disebutkan bahwa Penyalahguna dan Pecandu narkoba wajib untuk mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Namun di dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Hakim mempunyai wewenang untuk mengenyampingkan penyalahguna dan pecandu narkoba tersebut bisa menjalankan rehabilitasi. Dan di dalam Pasal 127 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat frasa “hakim wajib memperhatikan” Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut. Yang mana frasa “memperhatikan” semakin membuat rancu karena apabila hakim sudah memperhatikan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika namun dirasa tidak perlu memberikan rehabilitasi kepada penyalahguna dan pecandu narkoba. Maka tidak menjalankan apa yang disebutkan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan baik dan benar. 2) Kebijakan hukum terhadap penyalahguna dan pecandu narkoba di dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana disebutkan tentang memberikan rehabilitasi terhadap penyalahguna dan pecandu narkoba. Kebijakan hukum untuk beberapa putusan yang telah diteliti didakwa dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Namun tidak satu pun dari terdakwa yang dijatuhkan putusan menjalani rehabilitasi medis maupun sosial.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Narkoba, Kebijakan Hukum

ABSTRACT

This study aims to: 1) Analyze law enforcement against drug abuse in Article 127 of section 35 of the 2009 constitution about Narcotics in the perspective of section 35 of the 2009 constitution about Narcotics. 2) Analyze future legal policies against Article 127 of section 35 of the 2009 constitution about Narcotics. Based on these objectives, 2 (two) problems are formulated, namely: 1) How is the law enforcement of criminal acts against drug abuse in Article 127 of section 35 of the 2009 constitution about Narcotics in the perspective of section 35 of the 2009 constitution about Narcotics? 2) What is the future legal policy against Article 127 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics? This study applied a normative juridical research method. The conclusion obtained from this research: 1) in the law enforcement in section 35 of the 2009 constitution about Narcotics, there are a legal conflicts in this Law, namely between several Articles, namely Article 127, Article 54, and Article 103 of section 35 of the 2009 constitution about Narcotics, which states that Drug Abusers and Addicts are required to receive medical and social rehabilitation. However, in Article 103 of section 35 of the 2009 constitution about Narcotics, it is stated that the Judge has the authority to set aside the abuser and addict of narcotics to undergo rehabilitation. In addition, in Article 127 paragraph 3 of section 35 of the 2009 constitution about Narcotics, there is a phrase "judges must pay attention" to Article 54 of section 35 of the 2009 constitution about Narcotics, which makes it even more confusing because the judge has paid attention to Article 54 of section 35 of the 2009 constitution about Narcotics but it is not necessary to provide rehabilitation to abusers and addicts of narcotics. Then it does not carry out what is stated in Article 54 of section 35 of the 2009 constitution about Narcotics properly and correctly. 2) Legal policy towards drug abusers and addicts in Article 127 of section 35 of the 2009 constitution about Narcotics mentions providing rehabilitation for drug abusers and addicts. Whose several decisions that have been studied was charged with Article 127 of section 35 of the 2009 constitution about Narcotics, has none of the defendants who were sentenced underwent medical or social rehabilitation.

Keywords: Law Enforcement, Narcotics Crimes, Legal Policy